

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang disingkat dengan Pokja AMPL merupakan organisasi *ad-hoc* yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menangani Program Pengembangan Air Limbah yang berhubungan dengan sanitasi masyarakat. Adanya program ini membawa Kota Payakumbuh mendapatkan *Government Award* tahun 2016 untuk kategori Kota Kategori Kesehatan secara nasional. Pada tahun 2015 Kota Payakumbuh juga ditunjuk oleh Menteri Kesehatan untuk menjadi tuan rumah peringatan Hari Kesehatan Sedunia. Hal ini mengindikasikan baiknya Pokja AMPL dalam manajemen Program Pengembangan Air Limbah.

Data penelitian yang didapatkan dan hasil analisa peneliti dengan menggunakan teori manajemen dengan fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George. R. Terry menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Pada proses perencanaan Program Pengembangan Air Limbah penetapan tujuan telah ditetapkan sebelumnya oleh Tim Pemutakhiran SSK, namun dalam Tim tersebut OPD yang termasuk Pokja AMPL juga berkontribusi dalam menentukan tujuan dan penyelesaian dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh tahun 2014-2019. Untuk indikator merumuskan keadaan saat ini telah dilakukan oleh Pokja AMPL yaitu oleh Bappeda sebagai koordinator. Selanjutnya pda indikator mengidentifikasi kemudahan dan hambatan serta indikator pengembangan rencana telah dilakukan oleh Pokja AMPL. Melalui rapat Penetapan *Baseline* 100-0-100 Pokja AMPL merumuskan

kondisi terkini tentang pembangunan sanitasi di Kota Payakumbuh, untuk pengembangan rencana dilakukan oleh masing-masing OPD yang merujuk dari dokumen SSK, RPJMD dan hasil *Baseline* 100-0-100.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pada pengorganisasian Pokja AMPL telah melakukan fungsi manajemen tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh George R. Terry yaitu terdapat indikator struktur organisasi, adanya pembagian kerja yang dibagi atas tupoksi masing-masing OPD, Bappeda sebagai koordinator membagi pekerjaan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Kebersihan berdasarkan tupoksi masing-masing OPD. Dan indikator ketiga adanya komponen pengorganisasian yaitu kesesuaian antara personil dengan pekerjaan yang dilakukan.

3. Pengarahan (*Actuating*)

Pada penggerakan pemberian motivasi, komunikasi dan kepemimpinan pada Program Pengembangan Air Limbah telah dilakukan oleh Kepala Bappeda sebagai wakil ketua dan koordinator Pokja AMPL, komunikasi yang terjalin sangat lancar, ada dilakukan dengan cara yang formal, secara langsung maupun secara non formal. Kepemimpinan Kepala Bappeda bersifat demokratis dan mengayomi anggotanya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

pengawasan yang dilakukan Pokja AMPL dalam Program Pengembangan Air Limbah pada indikator penetapan standar telah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh teori, karena Pokja AMPL telah menetapkan standar sebelumnya. Pada indikator mengukur kinerja belum dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan teori, bahwa mengukur kinerja adalah tindakan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan. Namun Pokja AMPL tidak melibatkan masyarakat dalam evaluasi pada kegiatan Program Pengembangan Air Limbah. Dan yang ketiga pada indikator memperbaiki penyimpangan telah dilakukan Pokja AMPL.

Berdasarkan kesimpulan di atas manajemen Program Pengembangan Air Limbah oleh Pokja AMPL fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan telah dilakukan sesuai dengan teori, namun pada pengawasan masih terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pokja AMPL dalam pelaksanaan Program Pengembangan Air Limbah.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada Program Pengembangan Air Limbah, peneliti memberikan saran, antarlain :

Pokja AMPL sebagai Tim yang dibentuk Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menangani permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan khususnya pada penelitian ini adalah menangani pembangunan sanitasi dan kesehatan mempertahankan prestasi yang telah diraih sebelumnya banyaknya apresiasi dari berbagai pihak atas komitmen untuk terus berupaya berbenah dalam hal sanitasi dan kesehatan.

Pokja AMPL seharusnya lebih gencar lagi untuk melakukan pembangunan akses jamban dikarenakan hanya sisa 2 tahun menuju 2019 untuk mencapai akses 100% dan masyarakat terbebas dari buang air besar sembarangan yang merupakan amanat dari Pemerintah Pusat untuk seluruh daerah di Indonesia untuk mencapai yang namanya *Universal Access*.

Untuk fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan dipertahankan dalam memajemen Program Pengembangan Air Limbah dan atau untuk semua kegiatan dalam

Dokumen Strategi Sanitasi Kota secara keseluruhan, karena tidak memiliki kendala yang berarti dan perlu peningkatan agar lebih baik lagi.

Dalam proses pengawasan seharusnya masyarakat dilibatkan dalam mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Pokja AMPL, karena kegiatan ini bersifat partisipatif tentunya masyarakat diberikan peran yang cukup lebar untuk ikut dalam Program Pengembangan Air Limbah agar Pokja AMPL mendapatkan saran dan masukan yang membangun untuk kinerja yang lebih baik kedepannya.

